

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal daerah dituntut untuk meningkatkan daya saing di setiap pemerintah daerah. Daya saing pemerintah daerah akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang diraih melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pemerintah daerah memisahkan fungsi eksekutif dengan fungsi legislatif. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda (Harianto dan Adi, 2007).

Otonomi pada gilirannya akan menimbulkan kewajiban bagi segenap aparatur pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan sekaligus juga meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian daerahnya. Keberhasilan otonomi daerah diukur dari seberapa besar porsi sumbangan masyarakat lokal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini bukan hanya sekedar

pelimpahan kewenangan yang diikuti dengan pemberian sebagian sumber pendapatan bagi daerah untuk mendukung dan melaksanakan pelayanan publik, bukan juga berkuat pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah secara otonom, tetapi lebih dari itu yakni adanya peluang dan kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah dan segenap masyarakatnya secara bersama-sama untuk mengembangkan perekonomian daerah sendiri sesuai potensi dan kondisi riil yang ada di masing-masing daerahnya.

Pembangunan Ekonomi kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dikembangkan sesuai potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah agar dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, menciptakan iklim bisnis yang positif, membangun citra dan identitas wilayah berbasis pada sumberdaya yang merupakan keunggulan kompetitif yang dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif. Pembangunan dan pengembangan ekonomi lokal di Provinsi Nusa Tenggara Timur berbasis potensi lokal dan karakteristik wilayah sangat diperlukan untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan era milenial saat ini, untuk peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDRB) dan pertumbuhan Ekonomi masing- masing kabupaten/kota yang relatif konstan atau bahkan cenderung rendah pasca krisis ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi, dan daya saing industri yang masih rendah.

Kabupaten Kupang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mana ibu kota kabupaten terletak di Oelamasi. Berdasarkan pada data pertumbuhan PDRB Kabupaten Kupang tahun 2015 sebesar 3.968,94, tahun 2016 sebesar 4.159,67, tahun 2017 sebesar 4.371,88, tahun 2018 sebesar 4.595,82 dan tahun 2019 sebesar 4.831,61. Dari data yang didapatkan merupakan jumlah PDRB dari semua sektor yang merupakan unggulan dari Kabupaten Kupang. Kajian mengenai potensi pertumbuhan ekonomi dari semua sektor ini sangat di perlukan karena dapat mencerminkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal di Kabupaten Kupang.

Dalam pengelolaan anggaran, asas kemandirian dijadikan dasar Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri yaitu sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang

berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah (Kawedar, 2008). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Agung Priambodo, 2015). Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (UU No. 33/2004). Kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan kemandirian PAD, sebab semakin besar sumber pendapatan dari potensi daerah, bukan pendapatan dari bantuan, maka daerah akan semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat tanpa muatan kepentingan Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah (Soekarwo, 2003). Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah memberikan kualitas pelayanan publik yang baik.

Belanja Modal adalah investasi yang berupa pengadaan/pembelian aset yang bermanfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan aset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat secara ekonomis, sosial, dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Dengan demikian, belanja modal bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja modal merupakan komponen dari belanja pembangunan pada pengeluaran daerah. Belanja modal dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan ini mengakibatkan pembangunan berbagai fasilitas publik seperti jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik, gedung sekolah dan rumah sakit, pasar dan berbagai fasilitas publik lainnya yang akan di manfaatkan oleh masyarakat (Badrudin, 2017:21).

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya:

Muh. Resa Saputra, Haliah, Aini Indrijawati (2021), meneliti tentang” Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Pendapatan

Asli Daerah sebagai Variabel *Intervening*” hasil penelitian ini adalah: belanja modal terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal secara signifikan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan asli daerah sebagai variabel *intervening*. Muz’an Sulaiman (2020), meneliti tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat” hasil penelitian ini adalah PAD berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal, DAU berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal, dan belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi. Bintang Marseno dan Erly Mulyani (2020), meneliti tentang “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah dan luas wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. Dan Jaeni, Greg. Anggana L (2016), Meneliti Tentang “Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal” hasil penelitian ini adalah PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh PAD terhadap Belanja Modal.

Berdasar uraian yang dijelaskan dalam latar belakang masalah maka yang menjadi fokus penelitian adalah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel Intervening di Kabupaten Kupang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian**

Anggaran Belanja Modal melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel Intervening di Kabupaten Kupang.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang yang menjadi masalah pokok dalam penelitian adalah:

- a) Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kabupaten Kupang?
- b) Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kupang?
- c) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kabupaten Kupang?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasar latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk menguji apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal
- b) Untuk menguji apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kupang.
- c) Untuk menguji apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kabupaten Kupang.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

- a) Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan keilmuan bagi program studi Akuntansi berkaitan dengan mata kuliah Akuntansi Sektor Publik khususnya mengenai Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

b) Sebagai salah satu referensi bagi penelitian mendatang, khususnya penelitian terkait dengan Akuntansi Sektor Publik.

2. Manfaat praktis

Sebagai sumbangan bagi semua pihak dan juga bagi pemerintahan Kabupaten Kupang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyempurnaan penyusunan kebijakan pelaksanaan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.